

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 17  
TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN  
DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA  
Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah  
Kabupaten Dairi**

**TESIS**

*Oleh:*

**SEDIANA DAME ROMASI PASARIBU  
NPM. 161801050**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU  
ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/20/19

Access From (repository.uma.ac.id)

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 17  
TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN  
DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA  
Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah  
Kabupaten Dairi**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi  
Publik dalam Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik pada Program  
Pascasarjana Universitas Medan Area

*Oleh:*

**SEDIANA DAME ROMASI PASARIBU  
NPM. 161801050**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU  
ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/20/19

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi**

**N a m a : Sediana Dame Romasi Pasaribu**

**N P M : 161801050**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Dr. Warjio, MA**

**Pembimbing II**



**Dr. Isnaini, SH, M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik**

**Direktur**



UNIVERSITAS MEDAN AREA  
**Dr. Warjio, MA**



UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**Telah diuji pada Tanggal 11 Mei 2018**

**N a m a : Sediana Dame Romasi Pasaribu**

**N P M : 161801050**



**Panitia Penguji Tesis**

**Ketua Sidang : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M. Si**

**Sekretaris : Ir. Azwana, MP**

**Pembimbing I : Dr. Warjio, MA**

**Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M. Hum**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA**

Document Accepted 12/20/19

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

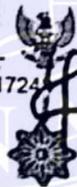
Medan, Mei 2018

Yang menyatakan,

METERAI  
TEMPEL

D0817AEF34201724

6000  
ENAM RIBU RUPIAH



**Sediana Dame Romasi Pasaribu**

## ABSTRAK

### **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA**

**Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi**

**Nama : Sediana Dame Romasi Pasaribu**  
**NPM : 161801050**  
**Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik**  
**Pembimbing I : Dr. Warjio, MA**  
**Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum**

Pemerintah Kabupaten Dairi telah menerbitkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2010 tersebut adalah untuk menjamin tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta sebagai pedoman standar bagi para Bendahara dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. Sampel diambil secara purposive sampling, yang berjumlah 22 orang. Analisis data dengan analisis deskriptif dengan menggunakan tabel frekwensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi dilihat dari aspek komunikasi, sumber-sumber, disposisi dan struktur birokrasi secara umum telah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Bendahara pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi telah melaksanakan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban serta Penyampaiannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bendahara telah melakukan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban serta penyampaian dengan baik karena sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

**Kata Kunci : Implementasi kebijakan, pengelolaan keuangan daerah, laporan pertanggungjawaban bendahara.**

## ABSTRACT

### **IMPLEMENTATION OF REGULATION OF DAIRI REGENT NUMBER 17 YEAR 2010 ABOUT PROCEDURE OF ADMINISTRATION AND PREPARATION OF ACCOUNTABILITY REPORT OF TREASURER AND ITS DELIVERY**

*Study On Financial Management And Asset Of Region of Dairi Regency*

**Nam e** : *Sediana Dame Romasi Pasaribu*  
**NPM** : *161801050*  
**Study Program** : *Master of Science in Public Administration*  
**Supervisor I** : *Dr. Warjio, MA*  
**Supervisor II** : *Dr. Isnaini, SH, M.Hum*

*Dairi Regency Government has issued Regulation of Dairi Regent Number 17 Year 2010 About Administration Procedure and Preparation of Accountability Report of Treasurer and its Submission. The purpose of the stipulation of Regulation of Dairi Number 17 Year 2010 is to ensure the orderly administration and accountability of implementation and accountability as well as standard guidance for the Treasurer in performing treasury duties in the Organization of Regional Devices (OPD). This study aims to analyze the Implementation of Regulation Dairi Regent No. 17 of 2010 on the Procedure of Administration and Preparation of Accountability Reports Treasurer and Delivery. The sample was taken by purposive sampling, which amounted to 22 people. Data analysis with descriptive analysis using frequency table. The results of this study indicate that the Implementation of Dairy Regent Regulation No. 17 of 2010 on the Procedures of Administration and Preparation of Accountability Reports Treasurer and its delivery to the Regional Finance and Asset Management Board Dairi viewed from the aspect of communication, sources, dispositions and bureaucratic structure in general have been able to running well in accordance with existing provisions. Treasurer of the Regional Finance and Asset Management Board of Dairi Regency has conducted the administration and preparation of accountability report and its Submission according to the prevailing regulations. The Treasurer has administered and prepared reports on accountability and submission as well as in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 13 of 2006 and the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 55 Year 2008 and Regulation of Dairi Number 17 Year 2010 About the Procedures of Administration and Preparation of Accountability Reports Treasurer and Delivery.*

*Keywords : Implementation of policy, regional financial management, accountability report of treasurer.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya Studi pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc , Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof.Dr.Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Warjio, MA, Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan yang cukup berarti dan semangat dalam penyelesaian studi.
4. Bapak Dr. Isnaini, SH.M.Hum, Wakil Direktur I Bidang Akademik, sekaligus sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan yang cukup berarti dan semangat dalam penyelesaian studi.

5. Pimpinan beserta seluruh staf, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi atas informasi yang diberikan kepada penulis guna penyelesaian tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar khususnya Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.
7. Terimakasih kepada Suami dan anak-anakku tercinta dan Ibu terkasih serta semua pihak yang telah memberikan bantuan serta seluruh keluarga yang senantiasa memberi dorongan dan semangat serta doa demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Mei 2018

**P e n u l i s**

**(Sediana Dame Romasi Pasaribu)**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Hasil Penelitian .....	6
1.5. Kerangka Penelitian.....	7
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Kebijakan Publik .....	8
2.2. Implementasi Kebijakan.....	22
2.3. Evaluasi Kebijakan.....	29
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Metode Penelitian.....	36
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian.....	36
3.3. Populasi dan Sampel.....	36
3.4. Definisi Konsep .....	37
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.6. Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Dairi .....	40
4.1.2. Profil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	42

4.2. Hasil Penelitian.....	48
4.2.1. Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD serta Penyampiannya .....	48
4.2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati/Dairi Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya ....	56
4.3. Pembahasan .....	79
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan.....	88
5.2. Saran - Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>93</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat dunia, dengan mengikuti perkembangan zaman reformasi pengelolaan keuangan negara terus dilakukan pemerintah melalui pembenahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Perubahan dari sistem terpusat menjadi sistem otonomi daerah telah memberikan dampak yang besar pada sistem penyelenggara pemerintahan dan ruang lingkup kinerja, hal ini juga berdampak pada pengaturan sistem keuangan pemerintah di daerah. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih memberikan pelayanan publik yang didasarkan asas-asas pelayanan publik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan kewajiban demi tercapainya tata kelola yang baik (*good governance*).

Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik, Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satu upaya tersebut dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut, perlu mengevaluasi serangkaian pedoman tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya.

Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai kepentingan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja daerah, mengingat adanya otorisasi yang telah diberikan oleh penetapan ke dalam peraturan daerah dan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang. Hal ini berkaitan erat dengan tugas pokok bendahara yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) yang terdiri dari bendahara penerimaan yang bertugas untuk membuat pembukuan atas pendapatan yang diterima tunai dan pembukuan atas pendapatan yang di terima melalui kas umum daerah, dan bendahara pengeluaran bertugas untuk mengajukan surat permintaan pembayaran UP/ GU/ TU, pembukuan penerimaan SP2D UP/ GU/ TU/ LS, pembukuan menggunakan uang persediaan, pembukuan pertanggungjawaban uang panjar, dan pembukuan pertanggungjawaban tambah uang.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan. Hadirnya PP. No. 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi pemerintah (SAP) serta dalam rangka melaksanakan Pasal 31 Ayat (4)

PP. No.8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 55 Tahun 2008, tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. Saat ini tugas dan peranan bendahara menjadi penting dan strategis sebagai Pengelola Keuangan, namun pedoman mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban mengenai Bendahara tidak diatur secara mendetail dalam Permendagri 13/2006 (Permendagri 59/2007), sehingga dibutuhkan pedoman yang lebih komprehensif bagi Bendaharawan Daerah.

Mengingat begitu pentingnya fungsi dari seorang bendahara dalam perannya melakukan pengelolaan keuangan daerah, kiranya perlu dievaluasi serangkaian pedoman tentang tata cara penatausahaan, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya, maka Pemerintah Kabupaten Dairi telah menerbitkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya adalah untuk menjamin tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta sebagai pedoman standar bagi para Bendahara dalam melaksanakan tugas-tugas kebhendaharaan di SKPD dan SKPKD.

Adapun pengelolaan keuangan daerah saat ini sudah menggunakan SIMDA. SIMDA adalah sistem informasi keuangan daerah, merupakan perangkat lunak yang dikembangkan dengan tujuan untuk membantu Pemerintah Daerah

dalam rangka Pengelolaan Keuangan secara efisien, efektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mulai dari penyusunan anggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban APBD. Kabupaten Dairi khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang memiliki fungsi sebagai SKPD dan sebagai Pemerintah Daerah, Pelaksanaan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara yang ada di BPKAD memiliki dua jenis penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban yaitu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD dan SKPKD yang berpedoman pada Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. Dalam prakteknya masih terdapat kendala yaitu kurangnya pemahaman bendahara terhadap Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. Harapan Pemerintah dengan adanya Peraturan Bupati Dairi nomor 17 tahun 2010 dan di dukung dengan Aplikasi Simda Keuangan maka laporan laporan dan surat pertanggungjawaban dapat tersedia tepat waktu, namun dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan ketidakterersediaan laporan laporan dan surat pertanggungjawaban yang tepat waktu akan penggunaan dana.

Atas dasar uraian di atas maka penulis melakukan penelitian Tentang “Implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta

Penyampaiannya, studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi”.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dairi ?
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya?

## 1.3. Tujuan Penelitian

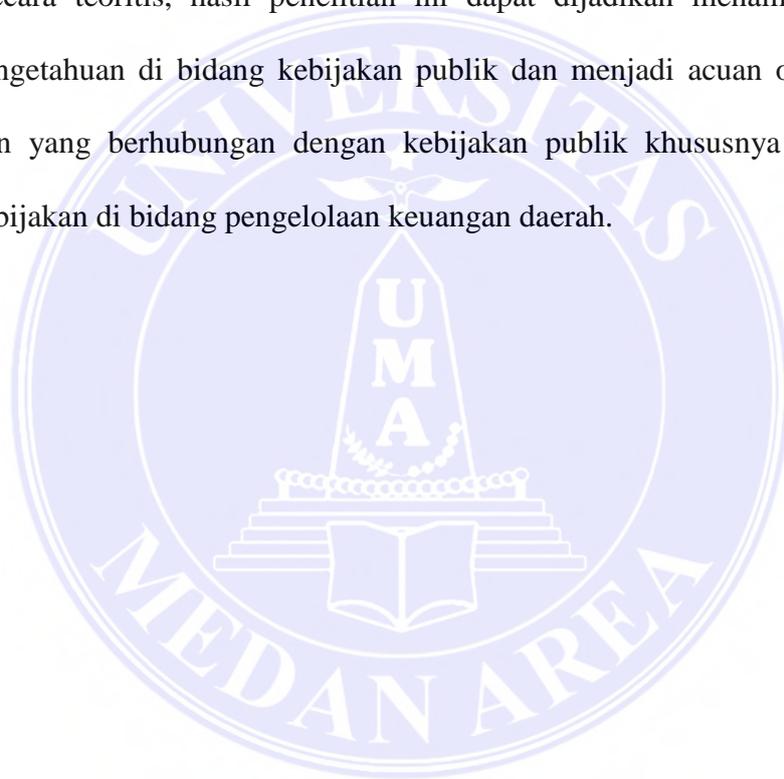
Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis Pelaksanaan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dairi .
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

#### 1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

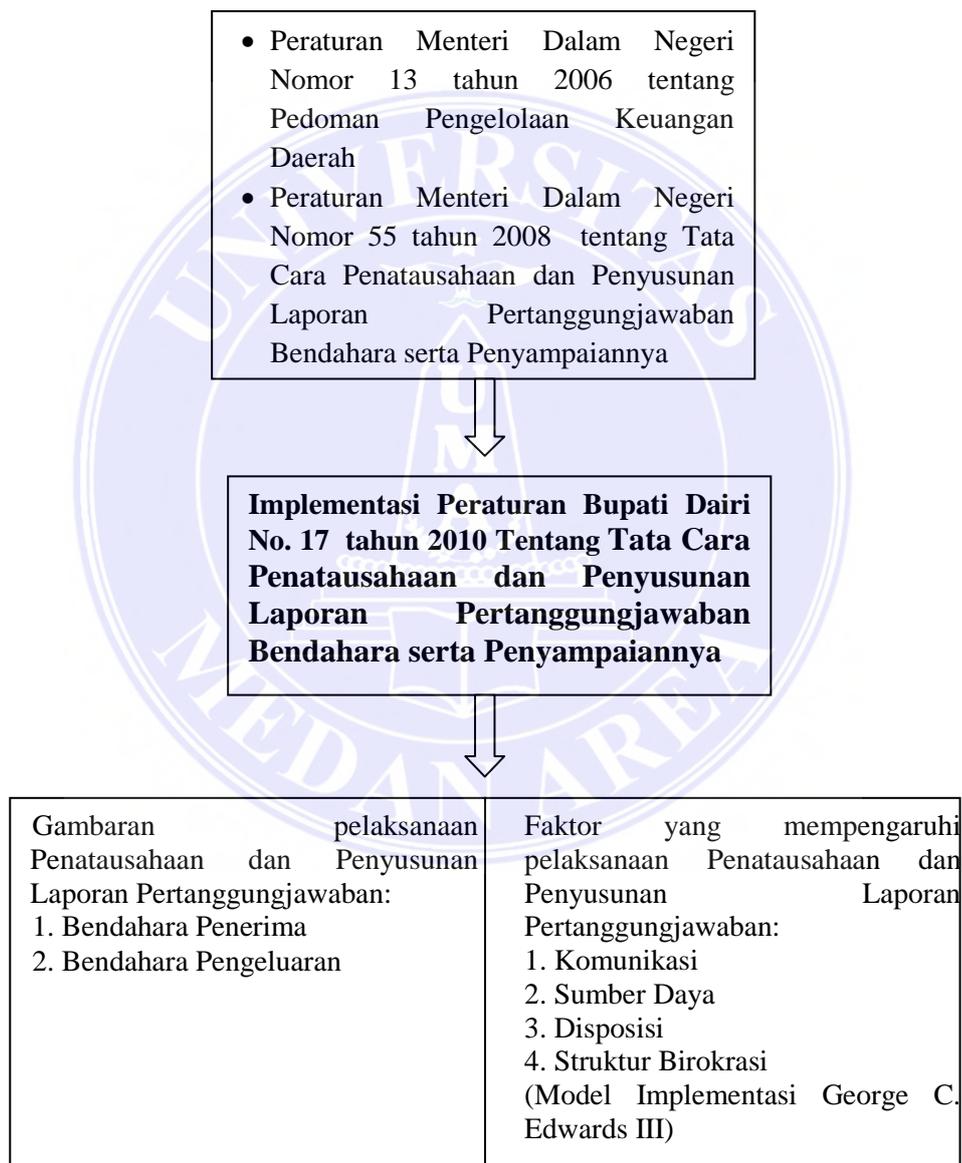
- (a) Secara praktis sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Dairi dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (b) Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan menambah khasanah pengetahuan di bidang kebijakan publik dan menjadi acuan oleh penelitian lain yang berhubungan dengan kebijakan publik khususnya implementasi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah.



### 1.5. Kerangka Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1 : Kerangka Konsep Penelitian**



## B A B II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Kebijakan Publik

##### 2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (1981) memberikan pengertian dasar mengenai kebijakan publik sebagai apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian ini kemudian dikembangkan dan diperbaharui oleh ilmuwan-ilmuwan yang berkecimpung di ilmu kebijakan publik sebagai penyempurnaan karena arti itu jika diterapkan, maka ruang lingkup studi ini menjadi sangat luas, disamping kajiannya yang hanya terfokus pada Negara sebagai pokok kajian.

Sedangkan Anderson (1975) memberikan definisi kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah: 1)Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan – tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2)kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah; 3)kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; 4)Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negative dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 5)kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Jadi pada dasarnya studi kebijakan publik berorientasi pada pemecahan masalah riil yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian analisis kebijakan publik secara umum merupakan ilmu terapan dan berperan sebagai alat atau ilmu yang berusaha untuk memecahkan masalah. Pada konteks ini kebijakan publik memiliki beragam perspektif, pendekatan maupun paradigma sesuai dengan focus dan lokus dari obyek penelitian atau obyek kajian.

Jones (1977) menekankan studi Kebijakan Publik ini pada 2 (dua) proses, yaitu:

- a. Proses-proses dalam ilmu politik, seperti bagaimana masalah-masalah itu sampai pada pemerintah, bagaimana pemerintah mendefinisikan masalah itu, dan bagaimana tindakan pemerintah.
- b. Refleksi tentang bagaimana seseorang bereaksi terhadap masalah-masalah, terhadap Kebijakan Negara, dan memecahkannya.

Menurut Charles O. Jones (1977) Kebijakan terdiri dari komponen-komponen:

- Goal atau tujuan yang diinginkan,
- Plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan,
- Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan, Decision atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- Efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).

Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam hubungannya dengan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat, kebijakan adalah keputusan-keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah – masalah yang telah diutarakan. Atau dapat juga Kebijakan diartikan sebagai suatu keputusan untuk mengakhiri atau menjawab pertanyaan yang diajukan kepada kita. Helco (1972) menggunakan istilah kebijakan itu secara luas, yakni sebagai rangkaian tindakan pemerintah atau tidak bertindaknya pemerintah atas sesuatu masalah. Jadi lebih luas dari tindakan atau keputusan yang bersifat khusus. Henz Eulau dan Kenneth Previt (1973) merumuskan Kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat kebijakan dan yang melaksanakannya.

Selanjutnya Jones (1977) memandang Kebijakan Publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya sedikit demi sedikit. Prinsip-prinsip pendekatan Jones (1977) tersebut adalah membuat Kebijakan dan yang melaksanakannya.

- a. Kejadian-kejadian dalam masyarakat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda oleh organisasi yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda.
- b. Banyak masalah yang timbul karena adanya peristiwa yang sama
- c. Ada berbagai tingkatan atau harapan yang harus dilalui kelompok penekan untuk memasuki proses Kebijakan yang ada.
- d. Tidak semua masalah-masalah publik menjadi agenda pemerintah.

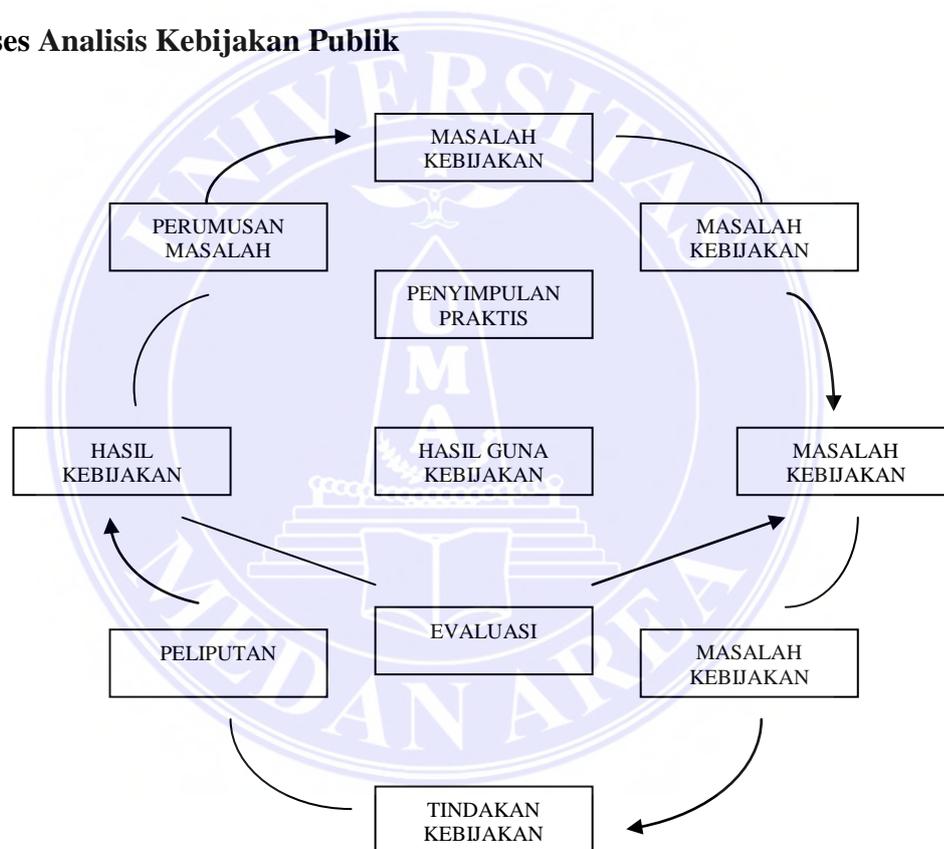
- e. Banyak juga kepentingan elit yang diangkat menjadi isu kebijakan dalam pemerintahan.
- f. Banyak masalah-masalah tidak dipecahkan oleh pemerintah, baik sengaja maupun tidak.
- g. Pembuatan Kebijakan tidak berhadapan dengan kelompok yang ada di masyarakat.
- h. Banyak pengambilan keputusan didasarkan pada informasi dan komunikasi yang kurang akurat.
- i. Kebijakan yang dibuat sering direfleksikan sebagai konsesus, daripada substansi dari pemecahan masalah
- j. Terjadi perbedaan dalam mendefinisikan kebijakan antara Pembuat Kebijakan dengan masyarakat yang terlibat.
- k. Banyak program yang dibuat dan dilaksanakan tidak seperti yang dirancang.
- l. Organisasi yang ada dalam masyarakat memiliki kepentingan dan fokus yang berbeda.

### 2.1.2. Proses Analisis Kebijakan Publik

Proses analisis kebijakan secara umum merupakan suatu proses kerja yang meliputi lima komponen informasi kebijakan yang saling terkait dan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan berbagai teknik analisis kebijakan (Dunn, 1994) seperti berikut ini:

Bagan 1

#### Proses Analisis Kebijakan Publik



Sumber : Tangkilisan : Kebijakan Publik Yang Membumi, 2000

Bagan dari proses analisis kebijakan tersebut di atas terjadi secara akumulatif antara komponen informasi dan teknik analisis yang digunakan untuk menghasilkan dan memindahkannya. Penggunaan teknik-teknik analisis kebijakan

(perumusan masalah, peramalan, peliputan, evaluasi, rekomendasi) memungkinkan analisis memindahkan salah satu tipe informasi ke informasi lainnya secara berkesinambungan. Informasi dan teknik saling bergantung, dimana keduanya terkait dalam proses pembuatan dan perubahan yang dinamis melalui transformasi informasi kebijakan (policy informational transformations). Pada konteks ini komponen informasi kebijakan (masalah kebijakan, alternative kebijakan, tindakan kebijakan, hasil kebijakan, dan hasil guna kebijakan) ditransformasikan dari suatu posisi ke posisi lainnya dengan menggunakan teknik analisis kebijakan.

Dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi kebijakan publik, Dunn (1994) mengemukakan bahwa ada beberapa tahap analisis yang harus dilakukan yaitu penetapan agenda kebijakan (agenda setting); formulasi kebijakan (policy formulation); adopsi kebijakan (policy adoption) isi kebijakan (policy implementation), dan evaluasi kebijakan (policy assesment). Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Agenda Setting**

Tahap penetapan agenda kebijakan ini, yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Pada hakekatnya permasalahan ditemukan melalui proses problem structuring. Woll (1966) mengemukakan bahwa suatu isu kebijakan dapat berkembang menjadi agenda kebijakan apabila memenuhi syarat berikut ini :

1. Memiliki efek yang besar terhadap kepentingan masyarakat;

2. Membuat analog dengan cara memancing dengan kebijakan publik yang pernah dilakukan;
3. Isu tersebut mampu dikaitkan dengan simbol-simbol nasional atau politik yang ada,
4. Terjadinya kegagalan pasar (market failure);
5. Tersedianya teknologi dan dana untuk menyelesaikan masalah publik.

Menurut Dunn (1994) problem structuring memiliki 4 fase yaitu: pencarian masalah (problem search), pendefinisian masalah (problem definition), spesifikasi masalah (problem specification) dan pengenalan masalah (problem setting). Sedangkan teknik yang dapat dilakukan untuk merumuskan masalah adalah analisis batasan masalah, analisis klarifikasi, analisis hirarki dan brainstorming, analisis multi perspektif, analisis asumsional serta pemetaan argumentasi.

## **2. Policy Formulation**

Berkaitan dengan policy formulation Woll (1966) berpendapat bahwa formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, dimana pada tahap para analis kebijakan publik mulai menerapkan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain. Dalam menentukan pilihan kebijakan pada tahap ini dapat menggunakan analisis biaya manfaat dan analisis keputusan, dimana keputusan yang harus diambil pada posisi tidak menentu dengan informasi yang serba terbatas.

Pada tahap formulasi kebijakan ini, para analisis harus mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan melalui prosedur forecasting untuk memecahkan masalah yang di dalamnya terkandung konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan yang akan dipilih.

### 3. Policy Adoption

Tahap adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para stakeholders atau pelaku yang terlibat. Tahap ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi dengan langkah-langkah sebagai berikut (Dunn, 1994) :

- 1) Mengidentifikasi alternative kebijakan (policy alternative) yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu bagi kemajuan masyarakat luas.
- 2) Pengidentifikasian kriteria-kriteria tertentu dan terpilih untuk menilai alternative yang akan direkomendasi.
- 3) Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan (tertentu) agar efek positif alternative kebijakan tersebut lebih besar daripada efek negative yang akan terjadi.

### 4. Policy Implementation

Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit eksekutor (birokrasi pemerintah) tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya (teknologi dan manajemen), dan pada tahap ini monitoring dapat dilakukan. Menurut Patton dan Sawicki (1993) bahwa implementasi berkaitan

dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Jadi tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dari program pemerintah.

## **5. Policy Assesment**

Tahap akhir dari proses pembuatan kebijakan adalah penilaian terhadap kebijakan yang telah diambil dan dilakukan. Dalam penilaian ini semua proses implementasi dinilai apakah telah sesuai dengan yang telah ditentukan atau direncanakan dalam program kebijakan tersebut sesuai dengan ukuran-ukuran (kriteria-kriteria) yang telah ditentukan.

Evaluasi kebijakan dapat dilakukan oleh lembaga independen maupun pihak birokrasi pemerintah sendiri (sebagai eksekutif) untuk mengetahui apakah program yang dibuat oleh pemerintah telah mencapai tujuannya atau tidak.

Apabila ternyata tujuan program tidak tercapai atau memiliki kelemahan, maka pemerintah harus mengetahui apa penyebab kegagalan (kelemahan) tersebut sehingga kesalahan yang sama tidak terulang di masa yang akan datang.

Menurut Dunn (1994) evaluasi kebijakan publik mengandung arti yang berhubungan dengan penerapan skala penilaian terhadap hasil kebijakan dan program yang dilakukan. Jadi terminology evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). Dalam arti yang lebih spesifik lagi, evaluasi kebijakan berhubungan dengan produk informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dari ulasan tersebut, maka dapat diketahui sifat dari evaluasi sebagai berikut :

- 1) Fokus nilai, dimana evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai suatu kebijakan dan program. Evaluasi merupakan upaya untuk menentukan manfaat dan kegunaan social kebijakan atau program, dan bukan sekedar upaya untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat diperdebatkan, maka evaluasi mencakup juga prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.
- 2) Interdependensi fakta dan nilai, dimana tuntutan evaluasi tergantung pada fakta dan nilai untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau rendah. Untuk itu diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, sekelompok atau seluruh masyarakat, namun implikasi yang lebih luas terhadap perkembangan social yang ada. Mencapai hal ini harus didukung

bukti secara actual yang merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah publik yang luas.

- 3) Orientasi masa kini dan masa lampau, dimana evaluasi bersifat retrospektif dilakukan setelah aksi-aksi dilakukan, sekaligus bersifat prospektif untuk kegunaan masa mendatang.
- 4) Dualitas nilai, dimana nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda karena dipandang mempunyai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai intrinsik atau ekstrinsik. Nilai-nilai terpola dalam suatu hirarki yang menggambarkan kepentingan para pelaku dan bersifat saling ketergantungan antara tujuan dan sasaran.

Masalah kegiatan fungsional dijelaskan oleh Jones (1977) dari sudut institusional, dimana organisasi bisa dilihat dari actor atau badan-badan yang berperan dalam implementasi program dengan memfokuskan diri pada peranan birokrasi. Penafsiran terhadap rencana kebijakan ke dalam proses implementasi hanya dilakukan oleh organisasi birokrasi pemerintah dan pihak-pihak yang lain yang terlibat dalam pelaksanaan program kebijakan. Suatu program kebijakan akan berhasil bila penafsiran oleh badan-badan eksekutif, birokrat, dan beberapa pihak lain yang terlibat dalam menyelenggarakan program-program tertentu. Suatu program dapat berlangsung dengan ditunjukkannya apakah keberadaan penafsiran masih mencukupi atau tidak.

Penafsiran yang berbeda-beda sering menimbulkan perdebatan. Meskipun demikian, perdebatan ini nantinya justru akan melahirkan suatu program baru

yang lebih baik. Sedang proses aplikasinya sering dikatakan merupakan suatu proses yang dinamis dimana para pelaksana dan pemaksa pada umumnya berpedoman pada peraturan-peraturan program atau standar dan realitas yang ada. Dari sudut penafsiran dapat dilihat bahwa proses penafsiran banyak dilakukan oleh badan-badan eksekutif, birokrat, dan beberapa fihak lain yang terlihat dalam menyelenggarakan program-program tertentu. Suatu program dapat berlangsung dengan ditunjukkannya apakah keberadaan penafsiran masih mencukupi atau tidak.

Kebijakan publik mempunyai pengertian yang variatif tergantung dari siapa yang mengemukakan sehingga tidak dapat digeneralisasikan menjadi suatu pengertian yang representatif memuaskan. Menurut James Anderson (dalam Islamy, 2000:17) mendefinisikan kebijakan adalah “*A Purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (“Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu”).

Menurut pendapat Thomas R. Dye (dalam Islamy, 2000:18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*Is whatever governments choose to do or not to do*” (“apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”). Dari pendapat ini mengandung pengertian sebagai suatu keputusan untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan, sehingga diam pun bisa dianggap sebagai suatu kebijakan. Selanjutnya Richard Rose (dalam Winarno, 2002:15) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami

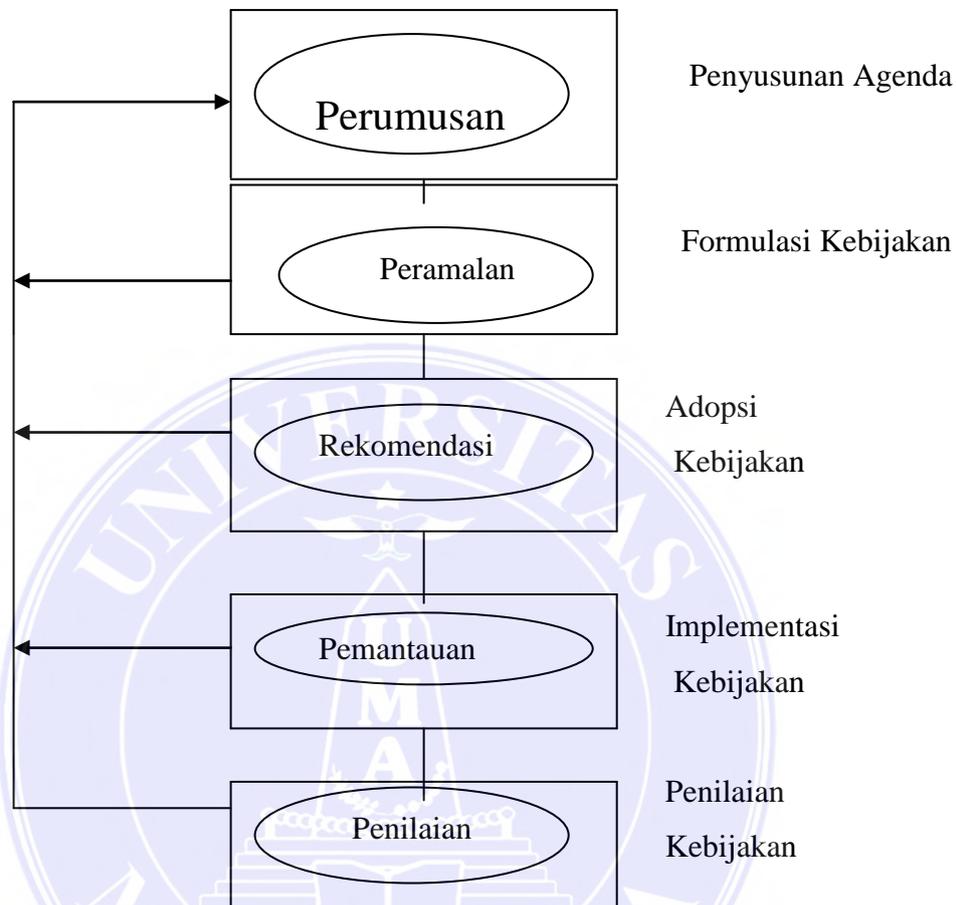
sebagai “Serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri.”

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik memiliki ciri-ciri antara lain :

- a. Selalu mempunyai tujuan tertentu atau suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Bersifat positif berupa tindakan-tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan suatu keputusan pemerintah untuk tidak melakukan apapun.
- c. Serangkaian kegiatan yang tidak berdiri sendiri.
- d. Dibuat dan dilakukan oleh pemerintah.
- e. Didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.
- f. Ditujukan untuk kepentingan umum.

Menurut William Dunn setiap kebijakan publik mencakup beberapa tahapan yang saling bergantung menurut urutan waktu : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Aktivitas kebijakan yang termasuk dalam prosedur analisis kebijakan seperti yang digambarkan oleh William Dunn di bawah ini :

Gambar 1 : Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan Dengan Tipe-Tipe Pembuatan Kebijakan



Sumber : Dunn, 2003 : 25.

Menurut Winarno (2002:17) bahwa, kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik meliputi tiga kegiatan pokok yaitu :

1. Perumusan Kebijakan publik
2. Implementasi kebijakan publik
3. Evaluasi Kebijakan publik

## 2.2. Implementasi Kebijakan Publik

### 2.2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi dirumuskan secara pendek bahwa “*to implement*” (mengimplementasikan) berarti “*to provide means for carrying out; to give practical effect to*” (menyajikan sarana untuk melaksanakan sesuatu; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu). Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik.

Menurut Udoji dalam Wahab (2008:64), menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Menurut Nakamura dan Smallwood dalam Tangkilisan (2003:17), hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkannya ke dalam keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan Jones dalam Tangkilisan (2003:17), implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang

mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka penulis dapat simpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

### **2.2.2 Model Implementasi Kebijakan**

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tujuan kebijakan, baik yang negatif maupun positif.

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan.

Adapun dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dikenal beberapa model sebagai berikut:

### A. Model Implementasi Kebijakan George Edward III

Edward di dalam Subarsono (2005:90), melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

- a) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
- b) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureucratic structure*.

#### 1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses

implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

## 2. **Sumber Daya (*Resources*)**

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber

daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

### 3. **Disposisi (*Disposition*)**

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

### 4. **Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)**

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari

tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

## B. Model Implementasi Kebijakan Grindle

Model Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan Grindle di dalam Nugroho (2004:74), menuturkan bahwa Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh isi kebijakan (*Content of Policy*) dan konteks implementasinya (*Context of Implementation*).

Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (*interest affected*).
2. Jenis manfaat yang dihasilkan (*tipe of benefit*).
3. Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*).
4. Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*).
5. Para pelaksana program (*program implementators*).
6. Sumber daya yang dikerahkan (*Resources committed*).

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud:

1. Kekuasaan (*power*).
2. Kepentingan strategi aktor yang terlibat (*interest strategies of actors involved*).

3. Karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristics*).
4. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsiveness*).

### **C. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn**

Model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn di dalam Nugroho (2004:76), mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
2. Karakteristik agen pelaksana/implementator
3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
4. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor.

### 2.3. Evaluasi Kebijakan Publik.

Dye (2001 : 2) mendefinisikan kebijakan publik dengan “...*anything a government chooses to do or not to do*“ (pilihan dari pemerintah untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu). Definisi itu, kurang memberikan kerangka analisis dan pemahaman yang jauh kedepan karena tidak membedakan secara jelas mana aktivitas pemerintah yang dikategorikan sebagai kebijakan publik, dan yang merupakan aktivitas rutin. Kebijakan publik merupakan persoalan pilihan juga dikemukakan oleh Cooper (Lynn, 2007: 26) yaitu bahwa kebijakan publik merupakan pilihan otoritatif yang dibuat demi kepentingan masyarakat. Sedangkan menurut Lynn (2007: 28), bahwa kebijakan publik merentang dari ketika dirumuskannya tujuan, program yang memiliki tujuan-tujuan tertentu, ketentuan umum yang mengatur keputusan-keputusan penting pemerintah di masa yang akan datang, suatu jalur tindakan tertentu, konsekuensi dari suatu tindakan maupun sikap pasif pemerintah, dan bahkan semua tindakan pemerintah.

Dari beberapa pengertian di atas menunjukkan bahwa konsep kebijakan publik merupakan konsep yang kompleks. Bagaimana seseorang menjelaskan kebijakan publik dan aspek yang menjadi fokus perhatiannya sangat dipengaruhi oleh kerangka referensinya, dan kerangka referensinya juga tergantung pada kepentingan, ideologi dan pengalamannya. Dalam konteks ini peneliti memahami kebijakan publik sebagai suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam usaha memilih tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu.

Menurut Ripley (Gaffar, 2000 : 3) bahwa pembuatan kebijakan publik terdiri dari tahap-tahap; (a) Agenda Setting (b) Formulation of Policy (c) Policy Implementation (d) Policy Evaluation. Penahapan itu menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan publik merupakan suatu proses administratif yang sifatnya berurutan, sehingga memudahkan bagi para pengambil kebijakan untuk memfokuskan pada persoalan yang strategis, yaitu pengambilan keputusan. Dalam konteks evaluasi terhadap proses dan out put pendidikan dan pelatihan pegawai, maka tahap policy evaluation yang tepat untuk dibicarakan.

Weiss (dalam Jones, 2004 :356) mengartikan “evaluasi” sebagai istilah untuk menimbang manfaat, dengan mengamati dan meneliti suatu fenomena berdasarkan beberapa ukuran yang eksplisit dan implisit. Dunn (2000 : 608) menyamakan istilah “evaluasi” dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dengan demikian istilah “evaluasi kebijakan” pada dasarnya merupakan tindakan untuk mengetahui sampai seberapa jauh sebuah kebijakan itu bermanfaat atau berhasil dengan mendasarkan pada ukuran-ukuran tertentu baik yang sifatnya eksplisit maupun implisit.

Menurut Jones (2004 : 357) kegiatan evaluasi dicirikan oleh sub-sub kegiatan ; spesifikasi, pengukuran, analisis dan rekomendasi, sebagai pembeda tingkatan upaya untuk menjadikan lebih tepat, ilmiah dan sistematis. Spesifikasi merupakan kegiatan identifikasi tujuan-tujuan dan kriteria-kriteria yang harus

dievaluasi dalam suatu proses atau program. Ia merupakan cara dimana “manfaat” harus dinilai atau dipertimbangkan. Pengukuran pada dasarnya merupakan kegiatan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan tujuan evaluasi baik informasi yang sifatnya pasti maupun tidak pasti dan impresionistis. Analisis adalah penyerapan dan penggunaan informasi yang dikumpulkan untuk membuat kesimpulan, dalam hal ini akan ditemukan perbedaan mengenai gaya dan metode evaluasi. Sedangkan rekomendasi adalah penentuan mengenai apa yang akan dilakukan selanjutnya yang dapat berbentuk perintah lisan ataupun laporan tertulis.

Sedangkan menurut Dunn (2000 : 608) dalam hubungannya dengan metode analisis kebijakan, metode evaluasi dikarakteristikan dengan beberapa hal yang membedakan dengan metode analisis kebijakan yang lain. Karakteristik metode evaluasi antara lain :

- a. *Fokus nilai*, yaitu dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan atau program. Fokusnya sebagai usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial dan bukan sekedar mengumpulkan informasi hasil aksi kebijakan yang terantisipasi atau tidak terantisipasi.
- b. *Interdependensi fakta-nilai*, yaitu bahwa pernyataan bermanfaat atau tidaknya sebuah kebijakan atau program harus didukung dengan bukti yang aktual, sehingga prasyarat yang diperlukan adalah pemantauan.
- c. *Orientasi masa kini dan masa lampau*, yaitu bahwa hasil evaluasi diorientasikan pada hasil sekarang dan masa yang lalu dari pada masa depan.

- d. *Dualitas nilai*, bahwa evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Sebagai kegiatan untuk mengetahui manfaat dari suatu kebijakan atau program, maka pada dasarnya evaluasi mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan evaluasi kebijakan oleh Dunn (2000 : 359) dibedakan dengan (a) *Political evaluation* – tujuan yang bersifat politis, yaitu sampai sejauh mana kebijakan atau program itu bermanfaat bagi proses-proses yang berkaitan dengan politik. (b) *Organizational evaluation* – tujuan yang bersifat organisasional, yaitu sampai sejauh mana kebijakan atau program bermanfaat bagi badan-badan pelaksana kebijakan atau program. (c) *Substantive evaluation* – tujuan yang bersifat substantif, yaitu sampai sejauh mana kebijakan atau program telah mencapai tujuan yang direncanakan dan bagaimana dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu disamping memiliki tujuan, maka evaluasi juga memiliki fungsi. Fungsi evaluasi meliputi, *pertama*, memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. *Kedua*, memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. *Ketiga*, memberikan sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Karena evaluasi kebijakan merupakan tindakan menilai ataupun menimbang, maka diperlukan standar penilaian. Dalam teori kebijakan publik lebih dikenal dengan istilah “kriteria evaluasi”. Menurut Dunn (2000 : 611) kriteria evaluasi biasanya diterapkan atau diaplikasikan secara restropektif (*ex post*). Sedangkan kriteria

evaluasi yang biasa digunakan antara lain ; efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Secara lebih spesifik evaluasi kebijakan berarti pembuatan informasi mengenai seberapa jauh suatu hasil kebijakan memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan dan sarana. Oleh karena itu, agar informasi yang dihasilkan valid dan terpercaya, maka diperlukan suatu metode ilmiah dalam membuat evaluasi. Menurut Suchman (Jones, 2004 : 377) terdapat enam langkah dalam melakukan riset evaluasi, yaitu :

- a. Mengidentifikasi tujuan-tujuan yang akan dievaluasi.
- b. Menganalisis permasalahan yang harus diatasi aktivitas tersebut.
- c. Mendeskripsikan dan menstandarisasi kegiatan tersebut.
- d. Mengukur tingkat perubahan yang terjadi.
- e. Menentukan apakah perubahan yang terjadi disebabkan oleh aktivitas tersebut atau karena beberapa sebab lain.
- f. Mengindikasikan *durabilitas* (daya tahan) terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan.

Menurut Ripley & Franklin (1982) tahap evaluasi harus terlebih dahulu menjawab beberapa hal berikut ini :

- 1) Pelaku atau kelompok masyarakat mana yang memiliki akses di dalam proses pembuatan kebijakan?
- 2) Apakah proses pembuatan kebijakan dilakukan secara terperinci, transparan dan memenuhi prosedur perundangan yang berlaku?
- 3) Apakah kebijakan yang berbentuk program tersebut didesain secara logis?

- 4) Apakah sumber daya yang digunakan mampu menjadi input program secara memadai untuk mencapai tujuan?
- 5) Apakah standar implementasi yang baik menurut ukuran kebijakan tersebut?
- 6) Apakah program dari kebijakan dilaksanakan sesuai standar efisiensi dan memenuhi perhitungan ekonomi” artinya lebih jauh, apakah sumber daya (financial) digunakan dan dialokasikan secara transparan?
- 7) Apakah kelompok sasaran (targets group) memperoleh pelayanan dan barang seperti yang didesain dalam program?
- 8) Apakah program memberikan dampak kepada kelompok lainnya? Apa jenis dampaknya?
- 9) Apa dampaknya, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan terhadap masyarakat?
- 10) Kapan tindakan program dilakukan dan dampaknya diterima oleh masyarakat?
- 11) Apakah tindakan dan dampak tersebut sesuai dengan yang diharapkan?

Dalam kaitan dengan kelompok sasaran dari program kebijakan, Kelman (1987) menyarankan pertanyaan pokok sebagai berikut:

- 1) Siapa yang memperoleh akses terhadap input dan output program kebijakan?
- 2) Bagaimana program kebijakan tersebut mempengaruhi perilaku mereka?

Dengan demikian dalam melakukan kegiatan evaluasi kebijakan, seorang analis kebijakan publik akan berhubungan dengan aspek perumusan kebijakan, dimana pada aspek ini analis berusaha mencari jawaban bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, siapa yang paling berperan dan untuk siapa kebijakan tersebut dibuat. Juga aspek implementasi, kebijakan, dimana pada aspek ini analis berusaha untuk mencari jawaban bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, apa

faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana kinerja dari kebijakan tersebut. Dan terakhir bagaimana melakukan suatu evaluasi yang sesuai dengan kriteria maupun ukuran yang telah ditentukan dalam desain program kebijakan bagi perbaikan maupun penyempurnaan pembuatan kebijakan publik di masa mendatang.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memberi penggambaran secara cermat suatu fenomena tertentu, oleh karenanya penelitian ini berusaha untuk mengembangkan konsep dan menghimpun fakta (Singarimbun dan Effendi, 1995: 4).

#### **3.2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi. Penelitian lapangan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, yaitu dari bulan Januari s/d Maret 2018.

#### **3.3. Populasi dan Sampel**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka sasaran dalam penelitian ini adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan proses Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi, yang meliputi pejabat struktural dan para staf/pegawai. Jumlah keseluruhan populasi sebanyak 22 orang. Mengingat jumlah populasi relatif kecil (kurang dari 100 orang) maka seluruh populasi dijadikan sampel (*total sampling*).

### 3.4. Definisi Konsep

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan yaitu Implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya yang diukur dari aspek :

#### 1. Komunikasi :

- Kejelasan konsep Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
- Kejelasan tujuan/sasaran kebijakan Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya yaitu adanya perangkat aturan yang efektif.

#### 2. Sumber Daya :

- Keahlian/kemampuan yang dimiliki komponen pelaksana dalam implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
  - otoritas/wewenang yang ada pada pelaksana
  - sumber daya, dana dan prasarana yang dimiliki

#### 3. Disposisi :

- Peranan Pemerintah Kabupaten Dairi

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset

#### 4. Struktur birokrasi :

- Adanya keterpaduan komponen pelaksana dalam pelaksanaan program
- Adanya pengaruh dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi keterpaduan komponen pelaksana dalam mencapai tujuan

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, yang diperoleh melalui : Kuesioner, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan dari responden melalui daftar pertanyaan tertutup dan terbuka yang diajukan, dengan menyajikan beberapa alternative jawaban yang sudah ditentukan.

Sedangkan data sekunder, dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu data yang diperoleh baik dalam bentuk angka maupun berupa uraian sesuatu hal yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan bahan informasi yang diperoleh dari instansi yang terkait dalam Implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Data – data yang sudah terkumpul selanjutnya perlu dianalisis agar dapat memberikan informasi yang jelas. Dengan format penelitian deskriptif, maka analisis data dilakukan melalui interpretasi berdasarkan pemahaman intelektual yang dibangun oleh pengalaman empiris. Interpretasi dan analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a). Pengumpulan data, melalui teknik dokumentasi untuk memperoleh data sekunder serta wawancara dan observasi untuk memperoleh data bersifat primer.
- b). Penilaian data dengan memperhatikan prinsip validitas, obyektivitas dan reabilitas. Untuk itu ditempuh prosedur:
  - Mengkategorisasikan data primer dan sekunder dengan system pencatatan yang relevan
  - Melakukan kritik atas data yang telah diperoleh dengan tujuan untuk melakukan kontrol apakah data tersebut relevan untuk digunakan.
- c). Interpretasi dan penyajian data, dilakukan dengan membuat analisis data dan fakta melalui pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar pengalaman empiris. Untuk itu diperlukan kecermatan dan harus dibekali dengan seperangkat teori yang relevan. Agar penyajian data lebih informative dan jelas, maka hasil interpretasi dan analisis data disajikan dalam bentuk table, persentase serta membuat deskripsi dalam rangkaian yang logis.
- d). Penyimpulan, yaitu penarikan kesimpulan atas dasar interpretasi dan analisis data.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dari pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi secara umum telah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Bendahara telah melaksanakan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban serta Penyampaiannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi dapat disimpulkan adanya Komitmen yang jelas dari para penentu Kebijakan, Pembagian tugas yang jelas serta adanya ketersediaan serta kecakapan SDM yang siap mengikuti perkembangan zaman.

## 5.2. Saran Saran

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi selaku PPKD, BUD, PA, harus melakukan pengawasan yang lebih ketat agar supaya laporan pertanggungjawaban yang disampaikan ke BPKAD selaku SKPKD sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Bendahara sebaiknya lebih aktif dalam menyikapi perkembangan peraturan terbaru, dengan belajar dan memahaminya secara mandiri tanpa menunggu munculnya berbagai petunjuk dari atasan
3. Pemerintah sebaiknya melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan/pelatihan formal dan non formal (Bimtek Akuntansi).
4. Perlu diadakan perbaikan dalam menetapkan standar penerimaan pegawai terutama di bagian keuangan, dengan mengutamakan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi dan IT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, 2006, *Kebijakan Publik*, Jakarta; Suara Bebas
- Agustino, Leo. 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek* (Edisi Revisi), Jakarta : Rineka Cipta,
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Anderson, James E., 1975, *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Chris I Nwagboso (Ph.D In-View) Assistant Lecturer Departement of Political Science University of Calabar, Calabar P.M.B 1115, Unical Cross River State-Nigeria, April 2012, *Public Policy and Challenges of Policy Evaluation in Third World*, “British Journal of Humaniora and Social Science”
- Dwiyanto, Agus, 2002, *Reformasi Birokrasi Di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Dunn, William N., 2003, Penerjemah Samodra Wibawa dkk., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N., 1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R., 1995, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.
- Dyah Larasati & Howel, Fiona .(2014). *Bantuan Siswa Miskin (BSM): Progam*
- Edward III, 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarter Press.
- Farida Yusuf Tayibnapis. (2000). *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika..
- Islamy, M.Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lufunyo, Hussein, 2013. “Impact of public sector reforms on service delivery in Tanzania”. *Journal of Public Administration and Policy Research*. Vol 5(2) pp. 26-49, May, 2013.

- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, 1984, *Qualitative Data Analysis*, Sage publication Inc, USA.
- Moleong, Lexy J., 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, "*The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society* 6, 1975, London: Sage.
- Marielle Berriet-Slliec, Pierre Labarthe, Catherine Laurent and Jacques Baudry, 17-18 February 2011, *Empirical Validity of The Evaluation and Quality of Evidence*. "International Journal of Sains and Research".
- Muhammad Rusli dan Hamsinah, Maret 2014, *Policy Evaluation Study on Subsidy Policy, Qualitative basis, for Poverty Alleviation in Pare-pare, South Sulawesi*, "International Journal of Sains and Research".
- Nugroho D, Riant, 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Nugroho D Riant, 2011, *Public policy : Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Manajemen Dalam Kebijakan Publik sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan Publik*, Yogyakarta; Elex Media Computindo.
- Nugroho D Riant, 2008, *Analisis Kebijakan Publik*, Malang, Banyu Media.
- Osborne, David, dan Ted Gaebler, 1993, *Reinventing Government: How the Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, New York: Plume Book.
- Osborne Dan Plastrik, 2004, *Banishing Bureaucracy: The Five Strategic For Reinventing Government*, Addison-Westey Publishing Company, Inc, California
- Purwanto, Erwan Agus & Dyah Ratih Sulistyatutu, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putra, 2003, *Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dalam Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta; Pustaka Belajar.
- Remi dan Tjiptoherijanto, 2003, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta; Elex media Computindo.
- Ripley, Randall B., 1985, *Policy Analysis in Political Science*, Nelson-Hall Inc., Chicago.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.

- Suharno, 2008, *Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta; UNY Press.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran George Edwards*. Yogyakarta: YPAPI.
- Van Meter, Donald S., and Carl E Van Horn, 1975, *Administration & Society : The Policy Implementation Process A Conceptual Framework*, Sage Publications Inc., Ohio.
- Woleong, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV.Remaja Rosdakarya.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Wibawa, Samudra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirawan.(2012). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta Penyampiannya.
- Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta Penyampiannya.
- Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Dairi Nomor 183).

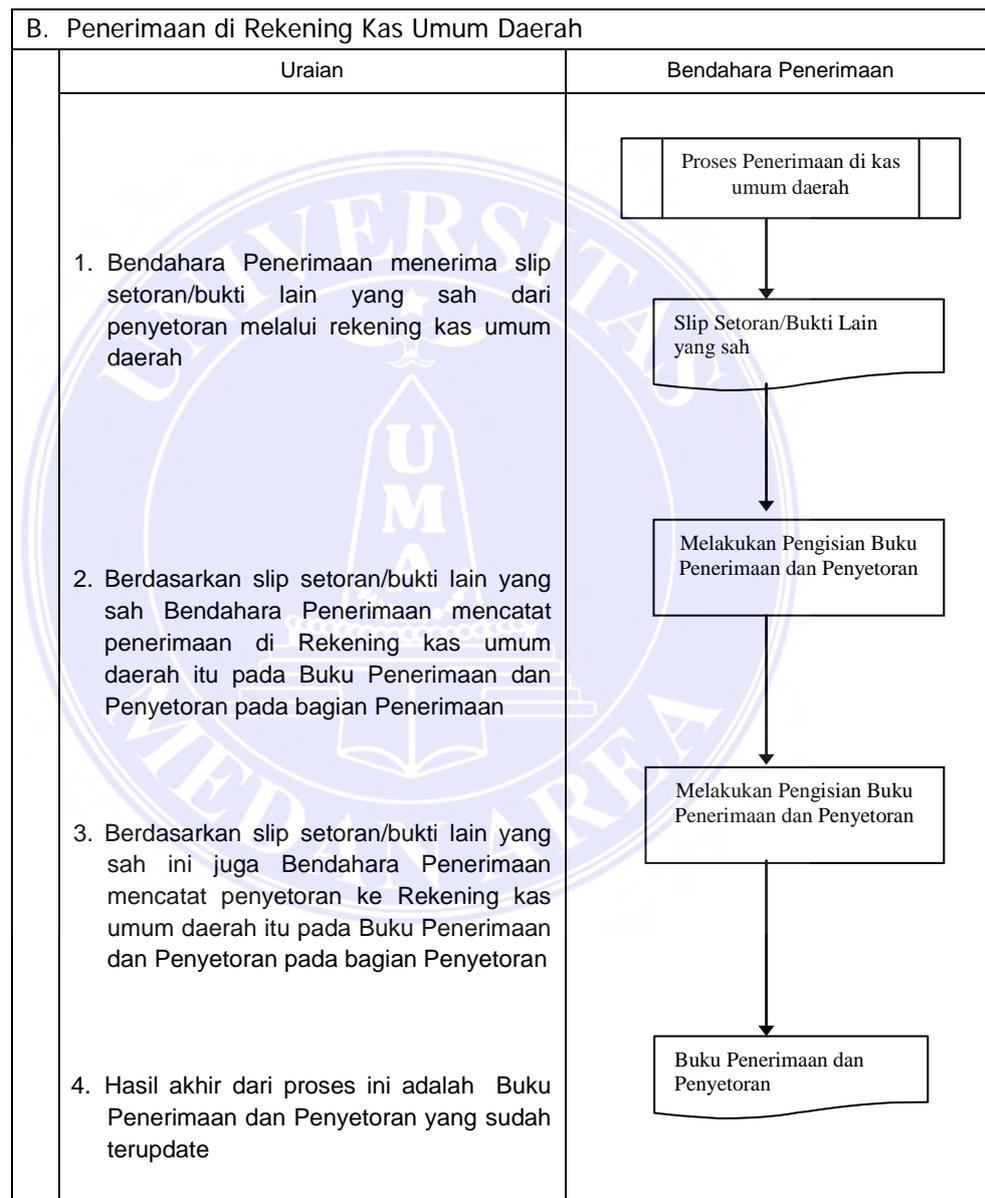
## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan Penerimaan dan Penyetoran atas Penerimaan Secara Tunai

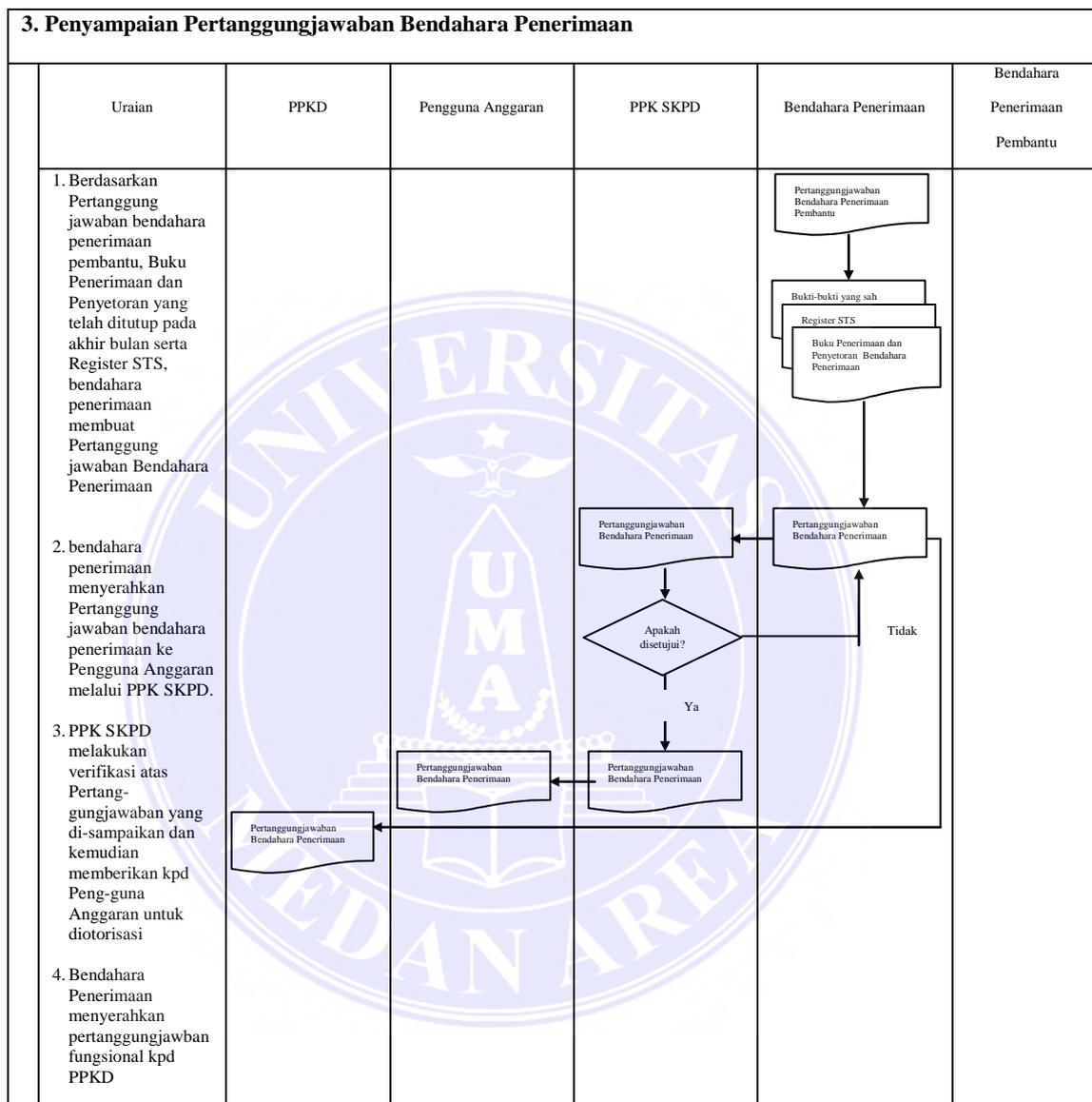
A.1. Pencatatan Penerimaan Tunai	
Uraian	Bendahara Penerimaan
<p>1. Bendahara penerimaan menyiapkan Surat Tanda Bukti Pembayaan/Bukti Lain Yang Sah</p> <p>2. Berdasarkan Dokumen Bukti Pembayaran/ Bukti Lain Yang Sah Tersebut, Bendahara Penerimaan melakukan Pengisian Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan pada bagian penerimaan. Kolom yang diisi ialah no. bukti, tanggal transaksi, cara pembayaran, kode rekening, uraian dan jumlah.</p> <p>3. Hasil dari penatausahaan ini adalah buku penerimaan dan penyetoran Bendahara Penerimaan yang sudah terupdate</p>	<pre> graph TD     A[Proses Penerimaan Tunai] --&gt; B[Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain Yang Sah]     B --&gt; C[Melakukan Pengisian buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan]     C --&gt; D[Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan]   </pre>

<b>A.2. Pencatatan atas Penyetoran Penerimaan Tunai</b>	
<b>Uraian</b>	<b>Bendahara Penerimaan</b>
<p>1. Bendahara penerimaan menyiapkan bukti surat tanda setoran ke rekening kas umum daerah.</p> <p>2. Berdasarkan STS tersebut, Bendahara Penerimaan mengisi Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan pada bagian Penyetoran Kolom Tanggal, No. STS dan Jumlah Penyetoran</p> <p>3. Kemudian Bendahara Penerimaan mengisi register STS</p> <p>4. Hasil dari penatausahaan ini adalah Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan dan register STS yang sudah ter update</p>	<pre> graph TD     A[Proses Penyetoran penerimaan tunai ke kas umum daerah] --&gt; B[Surat Tanda Setoran]     B --&gt; C[Melakukan Pengisian Buku Penerimaan dan Penyetoran]     C --&gt; D[Melakukan Pengisian register STS]     D --&gt; E[Register STS]     E --&gt; F[Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan]   </pre>

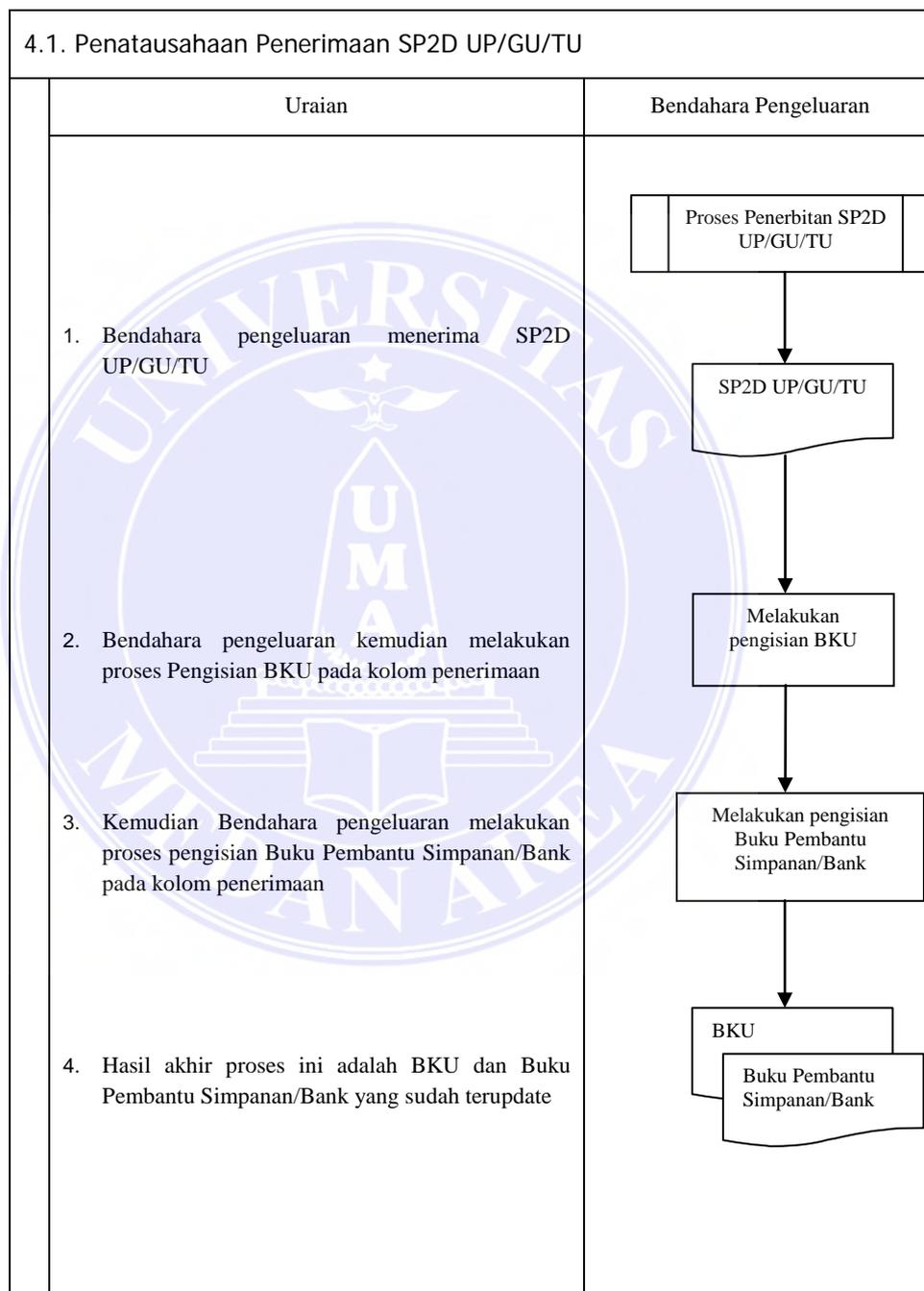
**Lampiran 2: bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan Penerimaan dan Penyetoran pendapatan melalui rekening kas umum daerah.**



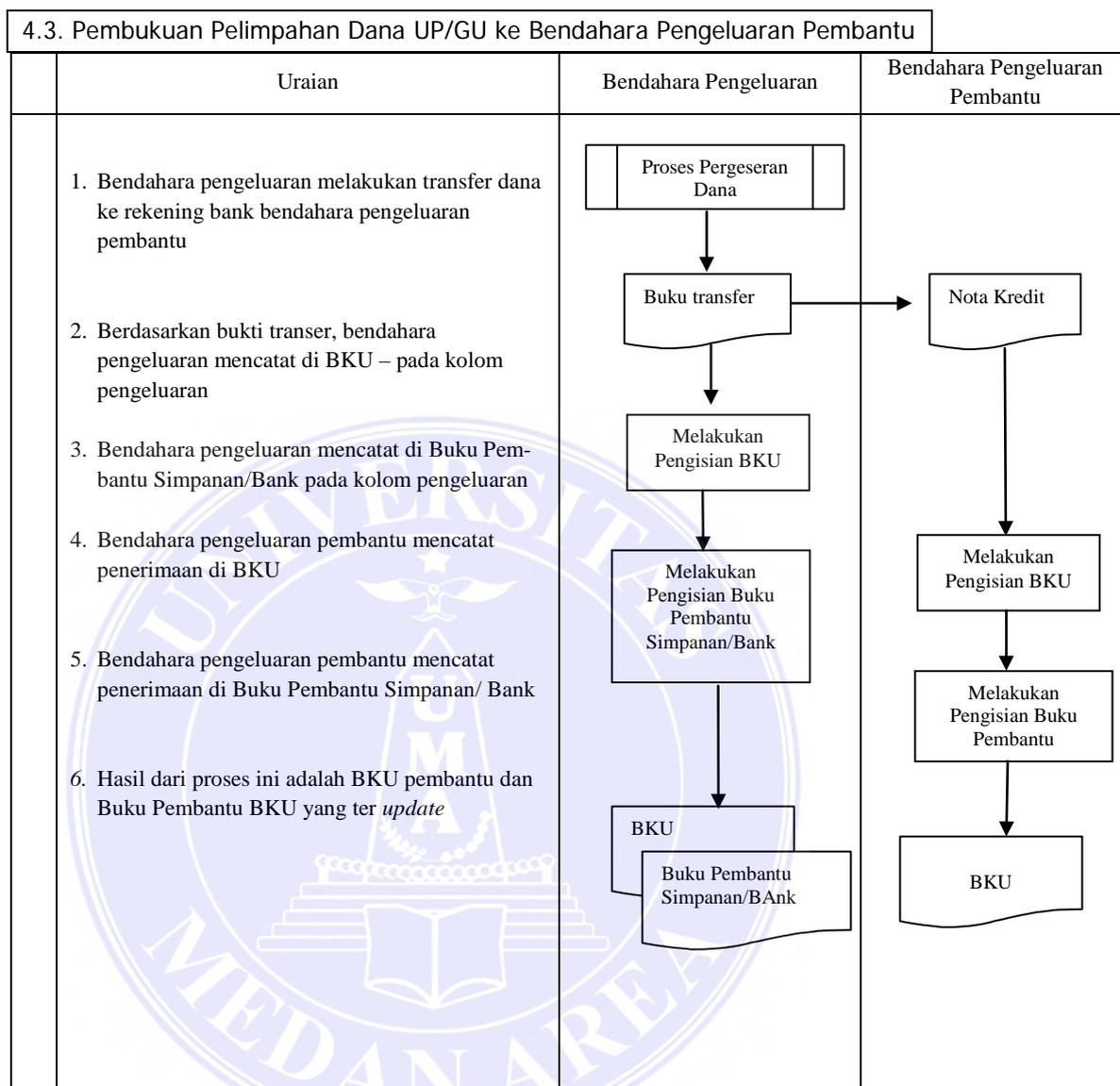
**Lampiran 3: Bagan alir yang menggambarkan proses penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan.**



**Lampiran 4: Bagan alir yang menggambarkan proses Penatausahaan Bendahara Pengeluaran**



4.2. Pembukuan Pergeseran Dana dari Rekening Bank Bendahara Pengeluaran Ke Kas Tunai Bendahara Pengeluaran	
Uraian	Bendahara Pengeluaran
1. Bendahara pengeluaran menyiapkan bukti pergeseran dana	<pre> graph TD     A[Proses Pergeseran Dana] --&gt; B[Slip penarikan/ bukti lainnya yang sah]     B --&gt; C[Melakukan pengisian Buku Pembantu Simpanan/Bank]     C --&gt; D[Melakukan pengisian Buku Pembantu Kas Tunai]     D --&gt; E[BKU]     D --&gt; F[Buku Pembantu Simpanan/Bank]     D --&gt; G[Buku Pembantu Kas Tunai]           </pre>
2. Kemudian Bendahara pengeluaran mencatat di Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom pengeluaran	
3. Selanjutnya Bendahara pengeluaran mencatat di buku pembantu kas tunai pada kolom penerimaan	
4. Hasil dari proses ini adalah BKU dan Buku Pembantu BKU yang ter update	



**Lampiran 5: Bagan alir yang menggambarkan proses penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.**

